

ABSTRAK

Fenomena Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional, kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Pencegahan tindak pidana korupsi tidaklah terlepas dari usaha aparat Penegak Hukum salah satunya Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi lebih ditegaskan lagi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memperkuat landasan hukum kewenangan jaksa selaku penyidik serta penuntut umum tindak pidana korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa (1) peran Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi secara yuridis, (2) efektivitas kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Blora, serta (3) kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Blora dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu”. (2) Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Blora lebih menitikberatkan pada perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya cukup tinggi. Dalam upaya memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Blora menempuh beberapa langkah, diantaranya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana dan pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata. (3) 3) Kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Blora dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain sulitnya memperoleh alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum, dalam tindak pidana korupsi masih terdapat adanya intervensi dari pejabat pemerintahan, minimnya saksi-saksi yang mendukung pembuktian, keterbatasan sarana dan prasarana, proses audit investigative kerugian Negara oleh pejabat yang berwenang relatif lama.

Kata Kunci: Peran Kejaksaan, Pemberantasan, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

The phenomenon of corruption in Indonesia is widespread in society. Its development continues to increase from year to year. The increase in uncontrolled corruption will bring disaster to the life of the national economy, the life of the nation and the state in general. Prevention of corruption is inseparable from the efforts of law enforcement officials, one of which is the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. The authority of the prosecutor's office in investigating and prosecuting criminal acts of corruption is further emphasized by Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia which has strengthened the legal basis for the authority of prosecutors as investigators and public prosecutors for corruption.

This study aims to examine, identify and analyze (1) the role of the Prosecutor's Office in handling criminal acts of corruption in a juridical manner, (2) the effectiveness of the prosecutor's office in handling corruption in the jurisdiction of the Blora District Attorney's Office, and (3) the obstacles faced by the Blora District Attorney's Office in dealing with corruption cases. handling of corruption eradication.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the study can be concluded: (1) The legal basis that gives authority to investigate corruption crimes to the Prosecutor's Office is Article 30 paragraph (1) letter d of Law number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia which reads "in the criminal field, the Prosecutor's Office has the duties and authority to carry out investigations of certain criminal acts". (2) The handling of corruption cases carried out by the Blora District Prosecutor's Office focuses more on cases of criminal acts of corruption whose losses are quite high. In an effort to maximize the return of state financial losses due to corruption, the Blora District Attorney took several steps, including returning state financial losses through criminal means and returning state financial losses through civil channels. (3) 3) The obstacles faced by the Blora District Attorney in eradicating criminal acts of corruption include the difficulty of obtaining legal evidence and evidence, in corruption crimes there is still intervention from government officials, the lack of supporting witnesses evidence, limited facilities and infrastructure, the process of investigative audit of state losses by authorized officials is relatively long.

Keywords: The Role of the Prosecutor's Office, Eradication, Corruption.